

PUBLIC VALUE KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA FULAN FEHAN DI DESA DIRUN KECAMATAN LAMAKNEN KABUPATEN BELU

Asni Yunita Habu Mau¹, Hendikus Hironimus Botha², Yoakim Rembu³, Pionisius Minggu⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Universitas Timor, Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur

E-mail: yunitaasni95@email.com; hendirbotha@email.com; s2yoakimrembu@email.com,
s2pionisiusminggu@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai publik yang terkandung dalam kebijakan pengembangan destinasi wisata Fulan Fehan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Permasalahan yang diangkat adalah minimnya keterlibatan masyarakat lokal, keterbatasan fasilitas pendukung seperti penginapan, dan kurangnya pengembangan produk lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada tiga indikator teori *Public Value* Mark H. Moore yaitu legitimasi dan dukungan, kapasitas operasional, dan nilai substansial. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengembangan telah memiliki legitimasi formal melalui peraturan daerah dan mendapat dukungan tokoh adat, pemerintah, serta sebagian masyarakat, namun partisipasi aktif masih terbatas. Dari sisi kapasitas operasional, beberapa sarana seperti MCK, *lopo*, dan spot foto tersedia tetapi sebagian rusak, sementara penginapan belum ada. Dari sisi nilai substansial, terdapat manfaat ekonomi berupa peluang usaha dan peningkatan pendapatan dari kopi Fulan Fehan dan jagung bosa, serta manfaat sosial budaya melalui Festival Fulan Fehan. Namun, pemanfaatan nilai ekonomi dan budaya belum optimal. Disarankan agar pemerintah meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperbaiki fasilitas, menyediakan penginapan, dan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan serta promosi produk lokal.

Kata kunci: Nilai publik, pengembangan, pariwisata

PUBLIC VALUE OF FULAN FEHAN TOURIST DESTINATION DEVELOPMENT POLICY IN DIRUN VILLAGE LAMAKNEN DISTRICT BELU REGENCY

ABSTRACT. This study aims to identify the public value contained in the development policy of the Fulan Fehan tourist destination and the supporting and inhibiting factors. The main issues raised are the limited involvement of local communities, inadequate supporting facilities such as accommodation, and the underdevelopment of local products. This research applies a descriptive qualitative method focusing on Mark H. Moore's Public Value framework: legitimacy and support, operational capacity, and substantive value. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the policy has formal legitimacy through regional regulations and support from traditional leaders, government, and part of the community, but active participation remains limited. In terms of operational capacity, basic facilities such as toilets, huts, and photo spots are available but some are damaged, while no accommodation exists. From the substantive value perspective, the policy provides economic benefits such as business opportunities and increased income from Fulan Fehan coffee and bosa corn, as well as socio-cultural benefits through the Fulan Fehan Festival. However, economic and cultural values are not yet optimized. It is recommended that the local government increase community involvement, improve facilities, provide accommodations, and empower communities through training and promotion of local products.

Keywords: Public value, development, tourism

PENDAHULUAN

Nilai publik (*Public value*) adalah konsep yang menggambarkan nilai yang diciptakan oleh organisasi atau kegiatan bagi masyarakat luas. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Profesor Mark H. Moore dari Harvard University, yang melihatnya setara dengan nilai pemegang saham dalam manajemen publik. Nilai publik dalam konteks kebijakan merujuk pada manfaat atau nilai yang dihasilkan oleh pemerintah melalui kebijakan dan layanan yang memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa kebijakan publik harus dirancang dan diimplementasikan untuk menciptakan nilai yang dirasakan oleh publik,

bukan hanya sekadar mencapai efisiensi administratif. Mark Moore (1995), dalam bukunya "*Creating Public Value*", menggagas bahwa manajer sektor publik, mirip dengan manajer sektor swasta yang menciptakan nilai ekonomi bagi pemegang saham, harus berfokus pada penciptaan nilai publik melalui program dan layanan yang dijalankan (Moore, 1995).

Kebijakan publik di Indonesia, seringkali terdapat sejumlah kasus di mana nilai publik yang dihasilkan tidak jelas atau bahkan dipertanyakan. Hal ini sering kali disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang, kurangnya partisipasi masyarakat, serta implementasi yang tidak efektif. Salah satu contoh nyata adalah kebijakan subsidi energi, yang meskipun bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, dalam praktiknya sering kali tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Selain itu, subsidi ini juga membebani anggaran negara dan tidak mendorong efisiensi energi, sehingga nilai publik yang diharapkan tidak tercapai secara optimal (Prima, 2024). Selain itu program pengentasan kemiskinan juga menghadapi kendala serupa. Meskipun dirancang untuk membantu masyarakat miskin, implementasinya sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan penyalahgunaan dana. Akibatnya, bantuan tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, mencerminkan ketidakjelasan nilai publik dari kebijakan tersebut. Contoh kasus tersebut menggambarkan pentingnya kejelasan nilai publik dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Ketidakjelasan nilai publik dapat menyebabkan kebijakan tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan bahkan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.

Fulan Fehan merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen. Lokasinya dapat ditempuh sekitar 42 km dari Kota Atambua melalui jalur Weluli, Kecamatan Lamaknen, atau sekitar 28 km jika melewati Desa Maudemu. Nama Fulan Fehan berasal dari bahasa Tetun, di mana *Fulan* berarti bulan dan *Fehan* berarti dataran rata. Penamaan ini dikaitkan dengan fenomena alam saat bulan purnama tampak seolah-olah muncul dari balik dataran tinggi Fulan Fehan. Kawasan ini berupa hamparan padang rumput di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.100 mdpl yang terletak di kaki Gunung Lakaan. Lanskapnya menawarkan panorama sabana hijau yang luas membentang hingga kawasan Balokama dan Gunung Lakaan. Suhu udara di Fulan Fehan relatif sejuk dan berbeda dengan kondisi iklim di Kota Atambua. Pada musim panas (September–Desember), suhu maksimum hanya berkisar 24° Celsius, sedangkan pada musim dingin (Juni–Agustus), suhu siang hari rata-rata 21° Celsius dan dapat turun hingga 14–18° Celsius pada malam hari (Woso, 2018)

Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan Fulan Fehan sebagai destinasi budaya luhur, mengigit potensinya dalam melestarikan dan mengangkat budaya lokal secara turun-temurun. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2023-2026. Selain itu, Peraturan Bupati Kabupaten Belu Nomor 42 Tahun 2023 mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Belu: peraturan ini mengatur struktur dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat lokal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata: Undang-undang ini menekankan pentingnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pasal 4 Undang-Undang ini menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Fulan Fehan sebagai salah satu tujuan wisata yang dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat lokal. Meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, pengelolaan destinasi ini menghadapi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi pemanfaatan ekonominya.

Salah satu tantangan atau permasalahan utama adalah minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk

memastikan bahwa pengembangan pariwisata sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, serta untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian destinasi. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata Fulan Fehan masih dalam tahap perkembangan. Beberapa inisiatif telah melibatkan warga setempat seperti melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan atau festival, dan pemerintah telah menyediakan lapak bagi masyarakat untuk menjajakan produk lokal, serta masyarakat memperoleh posisi tertentu seperti menjadi petugas destinasi, namun tantangan dalam pemberdayaan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi perhatian utama. Masyarakat setempat belum sepenuhnya memanfaatkan peluang ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat dapat berperan aktif dalam industri pariwisata. Penelitian yang dilakukan oleh Tiwu et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki bobot prioritas sebesar 0,094 dalam pengembangan objek wisata Fulan Fehan sebagai pendukung ekonomi desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada keterlibatan, masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Meskipun telah ada upaya melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata Fulan Fehan melalui festival dan kegiatan budaya lainnya, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan agar mereka dapat berperan lebih aktif dan memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dari sektor pariwisata.

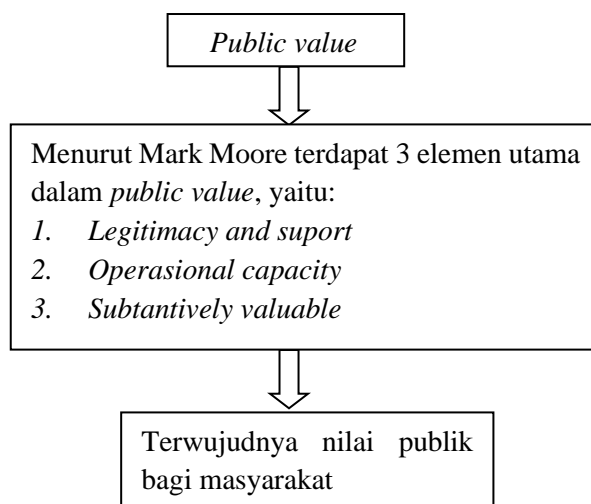
Kedua ketiadaan penginapan bisa menjadi kendala bagi wisatawan yang berasal dari luar daerah atau yang ingin menikmati suasana Fulan Fehan lebih lama. Dengan adanya penginapan di sekitar tempat wisata peluang usaha bagi masyarakat setempat meningkat seperti penyediaan layanan *homestay* dan kuliner. Masyarakat juga memperoleh lapangan pekerjaan karena pembangunan dan operasional penginapan memerlukan tenaga kerja, sehingga membuka peluang kerja bagi penduduk lokal dalam berbagai posisi, mulai dari staf operasional hingga manajemen.

Selain itu, kurangnya pengembangan produk wisata lokal, seperti kerajinan tangan dan kuliner khas masyarakat setempat, juga menjadi tantangan tersendiri. Walaupun sudah ada produk lokal yang dijual pada 3 lapak seperti kopi Fulan Fehan dan jagung bosc namun perlu ditingkatkan. Masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang ada, dengan menjual berbagai kerajinan tangan seperti kain tenun dan selendang yang memiliki nilai jual tinggi serta kerajinan tangan lainnya seperti anyaman yang menggunakan bahan alam seperti daun pandan dan lontar atau souvenir lainnya. Masyarakat juga dapat menjual makanan lokal lainnya, seperti umbi-umbian. Kebanyakan para penjual hanya menjual kerajinan tangan pada saat *event* besar seperti Festival Fulan Fehan sejak 2017 dan para penjual hanya menjual makanan siap saji atau makanan Toko. Produk-produk lokal ini seharusnya dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan sekaligus sumber pendapatan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis nilai publik dalam kebijakan pengembangan destinasi wisata Fulan Fehan di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Fokus ini mencakup tiga aspek utama sesuai dengan kerangka teori nilai publik dari Mark H. Moore, yaitu legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan, kapasitas operasional dalam pelaksanaan kebijakan, serta manfaat substansial yang dirasakan oleh masyarakat. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator utama dalam menilai apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar menciptakan nilai bagi publik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menganalisis masalah tersebut, penulis menggunakan teori nilai publik yang diperkenalkan oleh Mark H. Moore, dimana terdapat tiga indikator atau elemen utama yaitu *legitimacy and support*, *operational capabilities*, dan *substantively valuable*. Berikut gambar kerangka pemikiran :



Sumber: Olahan Peneliti 2025

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus penelitian mengacu pada tiga indikator segitiga strategis *public value* (nilai publik) yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu *Legitimacy and suport*, *Operational capability*, dan *Subtantively valuable*. Sumber data di peroleh melalui informen dan dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi untuk mengamati fenomena secara langsung, wawancara mendalam dengan informen kunci, serta dokumentasi dari arsip dan dokumen-dokumen tertulis. Proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Public Value* Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Fulan Fehan**

1. Legitimasi dan Dukungan (*legitimacy and support*)

Berdasarkan hasil penelitian legitimasi kebijakan pengembangan destinasi wisata Fulan Fehan didukung secara formal oleh adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2023–2026. Dalam regulasi ini, Fulan Fehan ditetapkan sebagai salah satu destinasi unggulan yang menjadi fokus pengembangan sektor pariwisata daerah. Legitimasi ini diperkuat oleh Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2023 mengenai kedudukan dan tugas Dinas Pariwisata, yang mengatur pengembangan destinasi secara kelembagaan.

Namun, legitimasi formal ini belum sepenuhnya sejalan dengan legitimasi sosial. Masyarakat lokal sebagai pemilik wilayah destinasi masih kurang dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Hal ini membuat masyarakat merasa kebijakan lebih banyak dijalankan oleh pemerintah daripada bersama masyarakat. Minimnya pelibatan masyarakat ini berpotensi menurunkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap destinasi, sehingga legitimasi sosial tidak berkembang sekuat legitimasi formal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legitimasi pengembangan Fulan Fehan kuat secara hukum dan kelembagaan, tetapi masih lemah secara sosial. Agar legitimasi kebijakan lebih kokoh, pemerintah daerah perlu memperkuat aspek sosial dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kebijakan. Keseimbangan antara legitimasi formal dan legitimasi sosial menjadi kunci penting untuk mewujudkan nilai publik yang diharapkan.

Sedangkan dari aspek dukungan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan masyarakat Fulan Fehan terlihat dalam keterlibatan mereka pada Festival Fulan Fehan. Masyarakat ikut serta melalui penyediaan lapak dagangan, partisipasi dalam atraksi budaya, dan keterlibatan pemuda sebagai petugas destinasi. Tokoh adat juga berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan wisata. Namun, dukungan ini masih terbatas sifatnya karena lebih dominan muncul saat ada event tertentu. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam perencanaan kebijakan, masih sangat minim. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho (2019) menekankan bahwa dukungan masyarakat lokal sangat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata. Penelitian Suherli (2021) juga menunjukkan bahwa meskipun dukungan ada, jika sifatnya hanya sesaat, maka keberlanjutan destinasi sulit tercapai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dukungan terhadap pengembangan Fulan Fehan sudah ada tetapi belum maksimal. Dukungan tersebut masih dominan dalam bentuk partisipasi saat event tertentu, bukan dalam bentuk dukungan berkelanjutan sepanjang tahun. Oleh karena itu, perlu strategi untuk memperkuat dan melembagakan dukungan masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lain agar lebih konsisten dan mampu memperkokoh keberlanjutan destinasi wisata.

2 Kapasitas Operasional (*Operational Capabilities*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Fulan Fehan, kapasitas operasional masih menghadapi banyak keterbatasan. Dari segi SDM, sudah ada partisipasi pemuda sebagai petugas destinasi, namun jumlah dan kompetensi mereka masih terbatas, serta belum ada pengelola profesional yang khusus ditugaskan. Dari sisi infrastruktur, sudah tersedia MCK, *lopo*, tempat parkir, spot foto, dan lapak penjualan. Akan tetapi, beberapa fasilitas mengalami kerusakan. Jalan menuju Fulan Fehan relatif baik dari arah Weluli, tetapi akses dari jalur lain masih kurang memadai. Sementara itu, teknologi promosi digital masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemasaran lebih banyak mengandalkan event tahunan seperti Festival Fulan Fehan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kapasitas operasional Fulan Fehan masih lemah. Walaupun ada fasilitas dasar dan keterlibatan pemuda, kondisi infrastruktur belum optimal, SDM masih terbatas, dan promosi digital minim. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan aspek operasional agar kebijakan benar-benar berjalan efektif.

3 Nilai Substansial (*Substantively Valuable*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

a. Manfaat Ekonomi

Kebijakan pengembangan destinasi wisata Fulan Fehan mulai memberikan dampak ekonomi, meskipun belum optimal. Masyarakat lokal telah diberikan ruang untuk menjual produk-produk lokal seperti: Kopi Fulan Fehan, dan Aneka makanan ringan atau jajanan toko. Cendera mata seperti aneka souvenir maupun selendang atau kain tenun belum tersedia atau di jual di destinasi, padahal memiliki nilai jual yang tinggi.

Namun, aktivitas ekonomi ini belum berlangsung secara rutin dan hanya ramai saat *event* besar seperti Festival Fulan Fehan. Selain itu, jumlah lapak penjualan masih terbatas (3 unit) dan belum semua masyarakat lokal terlibat dalam aktivitas ekonomi pariwisata.

Penginapan sebagai sumber ekonomi potensial juga belum tersedia. Ini menyebabkan wisatawan tidak bisa menginap dan mengurangi lama tinggal yang berdampak pada pengeluaran wisatawan. Padahal, pembangunan *homestay* atau penginapan dapat membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat.

Manfaat ekonomi dari pengembangan destinasi wisata Fulan Fehan masih bersifat potensial dan belum terealisasi secara maksimal, terutama karena kurangnya pemberdayaan masyarakat dan fasilitas penunjang ekonomi.

b. Manfaat Sosial dan Budaya

Dari sisi sosial dan budaya, kebijakan pengembangan Fulan Fehan telah memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya lokal. Hal ini tampak dari pelaksanaan Festival Fulan Fehan yang rutin menampilkan Tarian likurai, Pakaian adat, Ritual adat dan musik tradisional

Festival ini menjadi media untuk mengenalkan budaya masyarakat Belu kepada wisatawan serta memperkuat identitas budaya lokal, khususnya di Desa Dirun. Masyarakat merasa lebih dihargai dan memiliki kebanggaan terhadap budayanya.

Dari sisi sosial, adanya destinasi wisata juga memberikan ruang interaksi antara penduduk lokal dan wisatawan, yang dapat membangun modal sosial dan toleransi, meskipun belum ada mekanisme formal yang memperkuat aspek sosial ini.

c. Manfaat Politik

Secara politis, pengembangan Fulan Fehan sebagai destinasi unggulan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui sektor pariwisata. Kebijakan ini didukung oleh produk hukum seperti Perda No. 3 Tahun 2022 dan Perbup No. 42 Tahun 2023, yang menjadi wujud keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan wilayah pinggiran.

Namun demikian, partisipasi politik masyarakat dalam perumusan kebijakan masih rendah. Masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam perencanaan kebijakan, penentuan tarif, pengelolaan retribusi, atau pengawasan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai demokratisasi dan pemberdayaan politik belum sepenuhnya hadir dalam kebijakan ini. Potensi manfaat politik baru dirasakan dalam bentuk pengenalan daerah ke tingkat nasional, yang dapat meningkatkan legitimasi dan posisi tawar daerah di forum pembangunan provinsi dan nasional. Namun, untuk benar-benar menciptakan nilai politik, pemerintah perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan secara langsung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai substansial kebijakan pengembangan Fulan Fehan paling menonjol pada aspek sosial-budaya melalui pelestarian tradisi dan penguatan identitas lokal. Sementara itu, manfaat ekonomi masih bersifat potensial karena keterbatasan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat, serta nilai politik belum sepenuhnya terwujud akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mewujudkan Nilai Publik Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Fulan Fehan.

Berdasarkan analisis peneliti terkait penciptaan nilai publik dalam kebijakan pengembangan destinasi wisata Fulan Fehan, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan kebijakan, serta faktor penghambat yang masih menjadi tantangan di lapangan

a. Faktor Pendukung

Pada indikator legitimasi dan dukungan, faktor pendukung utama terlihat dari kuatnya dasar hukum yang melandasi pengembangan destinasi wisata Fulan Fehan. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Belu dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 menjadi legitimasi formal yang jelas. Regulasi tersebut memberi arah kebijakan, memperkuat posisi Fulan Fehan sebagai destinasi unggulan, serta memudahkan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dan program. Selain itu, dukungan sosial juga hadir dari tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat terkait penetapan Fulan Fehan sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Belu. Serta dukungan juga terlihat saat penyelenggaraan Festival Fulan Fehan, di mana masyarakat berpartisipasi melalui penampilan atraksi budaya maupun penjualan produk lokal. Keterlibatan tokoh adat memperkuat penerimaan sosial karena masyarakat merasa budaya mereka dihargai dan dijadikan bagian dari pariwisata.

Pada indikator kapasitas operasional, faktor pendukung yang terlihat adalah keterlibatan pemuda lokal sebagai petugas destinasi, baik dalam penarikan retribusi, pengelolaan parkir, maupun menjaga keamanan. Infrastruktur dasar seperti MCK, *lopo*, tempat parkir, spot foto, dan lapak dagangan juga sudah tersedia, meskipun masih sederhana dan terbatas. Selain itu, adanya upaya promosi melalui media sosial (Facebook, Instagram, YouTube) menunjukkan bahwa teknologi digital mulai dimanfaatkan untuk memperkenalkan destinasi. Hal ini memperlihatkan adanya fondasi awal untuk mendukung operasional pariwisata di Fulan Fehan.

Dari sisi nilai substansial, faktor pendukung terlihat dari manfaat ekonomi, sosial, dan politik yang dihasilkan. Masyarakat mulai mendapatkan keuntungan ekonomi melalui penjualan produk lokal dan keterlibatan dalam pengelolaan destinasi. Dari segi sosial-budaya, Festival Fulan Fehan menjadi sarana pelestarian tradisi, tarian adat, dan ritual yang memperkuat identitas lokal. Sementara itu, dari sisi politik, Fulan Fehan telah ditetapkan sebagai ikon wisata daerah yang memperkuat citra Kabupaten Belu di tingkat nasional, sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan kawasan perbatasan.

b. Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambatnya adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang masih terbatas. Dalam praktiknya, pengelolaan lebih banyak didominasi oleh lembaga adat atau pemerintah, sedangkan masyarakat umum jarang dilibatkan dalam proses perencanaan strategis. Hal ini menyebabkan rasa memiliki masyarakat terhadap destinasi belum sepenuhnya kuat, karena masyarakat hanya di libatkan dalam kegiatan operasional bukan dalam proses pembuatan kebijakan.

Pada kapasitas operasional, faktor penghambat utama adalah fasilitas seperti *lopo* dan gazebo mengalami kerusakan akibat minimnya pemeliharaan. Serta belum tersedianya fasilitas penginapan sebagai salah satu fasilitas pendukung. Selain itu, Akses jalan menuju Fulan Fehan juga masih terbatas, terutama dari jalur Maudemu yang rusak dan rawan kecelakaan terutama saat musim hujan.

Sementara pada nilai substansial faktor penghambatnya yaitu kurangnya pengembangan produk lokal, seperti kerajinan tangan dan kuliner khas masyarakat setempat. Kerajinan tangan seperti kain tenun maupun selendang mempunyai nilai jual yang tinggi, serta dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan sekaligus sumber pendapatan bagi masyarakat, namun belum di kelola secara optimal. Berikut adalah tabel analisis penghambat penciptaan nilai publik berdasarkan indikator tersebut:

KESIMPULAN

Nilai publik dapat dicapai jika dapat memenuhi segitiga strategis *public value* (nilai publik). Dalam segitiga strategis terdapat tiga indikator menurut Moore (1995) yaitu: *Legitimacy and Support* (legitimasi dan dukungan), *Operational Capabilities* (kemampuan operasional), dan *Substantively Valuable* (nilai substansial).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan destinasi wisata Fulan Fehan dapat dikatakan bermanfaat dan bernilai publik bagi masyarakat, hal tersebut dapat kita lihat dari ketiga indikator dari segitiga strategis yang telah terpenuhi, meskipun belum optimal. Kebijakan ini masih memerlukan penyempurnaan pada aspek partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, fasilitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam proses penciptaan nilai publik melalui kebijakan ini, terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Dukungan dari regulasi formal, tokoh adat, serta partisipasi masyarakat, penyediaan fasilitas penunjang menjadi faktor pendorong yang penting. Namun, masih terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat berupa minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, keterbatasan fasilitas fisik, dan kurangnya pengembangan produk lokal. Untuk itu, pelibatan masyarakat sebagai aktor utama dan peningkatan infrastruktur dasar menjadi krusial agar nilai publik yang diharapkan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Daerah meningkatkan keterlibatan masyarakat serta memperbaiki infrastruktur pendukung destinasi wisata. Pengelola destinasi perlu memperkuat manajemen dan promosi wisata dengan melibatkan berbagai pihak secara merata. Sementara itu, masyarakat lokal diharapkan lebih aktif memanfaatkan peluang ekonomi yang ada serta tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan agar pengembangan wisata Fulan Fehan dapat berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

PUBLIC VALUE KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA FULAN FEHAN DI DESA DIRUN KECAMATAN LAMAKNEN KABUPATEN BELU

(Asni Yunita Habu Mau, Hendikus Hironimus Botha, Yoakim Rembu)

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Timor, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan **kepada** Pemerintah Kabupaten Belu, khususnya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Belu, para tokoh adat, masyarakat Desa Dirun, dan pengelola destinasi wisata Fulan Fehan yang telah memberikan informasi, data, serta kerjasama selama penelitian berlangsung. Tidak lupa penulis menghargai bimbingan dan arahan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, masukan, serta motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, A., Fitri, A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal. (2022). Tahapan pembuatan kebijakan publik sebagai landasan pengambil kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148–155. <https://ejournal.stkip-mmb.ac.id/index.php/mp>
- Abdulrahman, M., & Ali, S. (2012). Dikutip dalam Sugiyono *Metode Penelitian dalam Perspektif Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi ke-15). Jakarta: Rineka Cipta
- Bere, Y. (2021). *Dampak Sosial Budaya Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pedesaan Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 8(2), 55–67.
- Dethan, F. (2022). *Kapasitas Pengelolaan Destinasi Wisata di Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–58.
- Esterberg. Pengertian Wawancara. Dikutip dalam Sugiyono, *pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Herdiana, D. (2012, Desember 24). *Definisi kebijakan publik*. Diakses dari <https://dianherdiana.com/2012/12/24/definisi-kebijakan-publik/>
- Herlianti, E. V., & Sanjaya, R. B. (2022). Dampak positif pariwisata terhadap budaya, ekonomi, dan lingkungan di Kasepuhan Cipta Mulya. *Jurnal Kritis*, 31(2), 132–149. <https://doi.org/10.24246/kritis.v31i2p132-149>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi penelitian bisnis: Untuk akuntansi & manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jamil, M. (2024, Februari 15). *Definisi destinasi wisata menurut para ahli & elemen dasar dari destinasi wisata*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/muhammadjamil1597/65ce53ae12d50f71ac434563/definisi-destinasi-wisata-menurut-para-ahli-elemen-dasar-dari-destinasi-wisata>
- Jendela Dunia. (2023, Juni 10). *Pengertian destinasi wisata dan jenis-jenis pariwisata Indonesia*. Kumparan. <https://kumparan.com/jendela-dunia/pengertian-destinasi-wisata-dan-jenis-jenis-pariwisata-indonesia-20ZbZX1ibt6/full>
- Karunasena, K., & Deng, H. (2011). A Revised Framework For Evaluating The Public Value Of E-Government. *PACIS 2011 Proceedings*, 91. <https://aisel.aisnet.org/Pacis2011/91/>
- Kompas.com. (2020). *Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/26/184500569/faktor-yang-memengaruhi-pertumbuhan-ekonomi?page=all>
- Meko, J. (2021). *Legitimasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Timor Tengah Utara*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 33–44.
- Miles dan Huberman. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mudilah, A. T. (2020). *Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik Buanik dalam meningkatkan perekonomian kaum marginal (Studi kasus di Dusun Dadapan Desa Sumberejo Kec. Ngasem Kab. Kediri)*. Skripsi, IAIN Kediri. Diakses dari <https://etheses.iainkediri.ac.id/2685/3/931313513%20bab2.pdf>
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndun, Y. (2020). *Keterbatasan Infrastruktur dalam Pengembangan Pariwisata Daerah di Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(2), 77–89.
- Nugroho, A. H., & Prasetyo, B. (2022). Nilai Publik dalam Perencanaan Revitalisasi Bantaran Sungai Menjadi Daerah Wisata di Kelurahan Kemirirejo RW 03, Kota Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 6(1). Tersedia di: <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/2486>
- Nugroho, R. (2003). *Public Policy: Teori Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Proses Kebijakan Publik, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risiko Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurhidayah, S. (2021). *Dampak objek wisata alam Gunung Nona terhadap perekonomian masyarakat di Desa Bambapuang Kabupaten Enrekang (Dalam tinjauan ekonomi Islam)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Pakarti, D. B. (2018). *Public values kebijakan Dinas Sosial Kota Surabaya: Studi tentang nilai-nilai publik program Campus Social Responsibility Kota Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemayun, I. D. G. A., & Sutiarmo, M. A. (Eds.). (2024). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Eureka Media Aksara.
- Prima, M. (2024, April 30). *Contoh kebijakan publik yang gagal di Indonesia: Ketika birokrasi bekerja seperti alat yang mengganggu*. Tambah Pinter. <https://tambahpinter.com/sekolah/page/1438/>
- Ridho, L. M. I. (2019). *Analisis dampak pengembangan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat Dusun Sade Desa Rembitan Lombok Tengah* (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Ridhotuloh, W., Hidayat, A. R., Oktavio, R. F., Arzaq, M. N., Qurrota, S., & Kurniawan, S. E. P. (2024). Model-model kebijakan publik: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), 313–319.
- Ringa, M. B. (2020.). *Strategi Place Triangle pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (Place Triangle strategy for development of sustainable tourism based on community in Kupang City, East Nusa Tenggara)*. Politeknik Kupang. <https://media.neliti.com/media/publications/465220-place-triangle-strategy-for-development-de847226.pdf>
- Safwan, S. B. (2022). *Analisis dampak pariwisata terhadap perekonomian masyarakat lokal (Studi objek wisata Waduk Brayeun di Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Sari, R. (2018). *Legitimasi Sosial dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 120–132.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherli. (2021). *Dampak pariwisata terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau (Studi kasus: Pantai Indah Sergang Laut)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Riau).
- Suryono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Terry, G. R. (2009). *Dasar-dasar Manajemen* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Tiwu, M. S., Fanggidae, A. H. J., & Klau, W. W. (2022). Strategi Pengembangan Objek Wisata dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan: Studi pada Objek Wisata Fulan Fehan. *Jurnal Studi Perhotelan dan Pariwisata*, 1(2), 53–61. <https://doi.org/10.35912/jspp.v1i2.2214>

- Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Lina Ismawati. 2010. *Penulis Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Penerbit Genesis. Bekasi.
- Wikipedia. (2023, Februari 25). Nilai Publik. https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_publik
- Woso, A. (2018). *Fulan Fehan: Pesona Sabana di Tapal Batas Nusa Tenggara Timur*. Diakses dari <https://wisata.app/diary/keindahan-fulan-fehan-wisata-bukit-di-ntt>
- Wulandari, N. (2019). *Manfaat Sosial Budaya Pariwisata Pedesaan di NTT*. Jurnal Pariwisata Nusantara, 5(3), 89–98.
- Zulkarnain. (2003). *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Pemerintah Indonesia. (2009)**. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Pemerintah Kabupaten Belu. (2022)**. Peraturan Bupati Kabupaten Belu Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Belu.
- Pemerintah Kabupaten Belu. (2022)**. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2023-2026.